



LAPORAN KEUANGAN

**TAHUN 2025 UNAUDITED
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG
(099193)**

**UNTUK PERIODE BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
BAGIAN ANGGARAN 005.03
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Ahmad Yani No. 133
Telp. 0627 22201/21053 Fax 0627 21053
Dairi-Sumatera Utara 22212
email: keuanganpn.sidikalang@yahoo.com





**LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2025 UNAUDITED
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG
(099193)**

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025

BAGIAN ANGGARAN 005.03

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

**Jl. Ahmad Yani No. 133
Telp. 0627 22201/21053 Fax. 0627 21053
Dairi - Sumatera Utara 22212
e-mail : keuanganpn.sidikalang@yahoo.com**

Kata Pengantar

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Tahun 2025 Tingkat UAKPA satuan kerja Pengadilan Negeri Sidikalang. Satuan kerja Pengadilan Negeri Sidikalang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 Satuan kerja Pengadilan Negeri Sidikalang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan No. 232/PMK.05/2024 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara nomor S-2/PB/2026 tanggal 7 Januari 2026 hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025 . Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sidikalang. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sidikalang, 06 Februari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang

Eva Rina Sihombing



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab.....	iii
Ringkasan Laporan Keuangan.....	iv
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	6
II. Neraca.....	7
III. Laporan Operasioanal.....	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	9
V. Catatan Atas Laporan Keuangan.....	10
A. Penjelasan Umum.....	10
A.1 Profil Pengadilan Negeri Sidikalang.....	10
A.2 Basis Akuntansi.....	10
A.3 Dasar Pengukuran.....	10
A.4 Kebijakan Akuntansi.....	11
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	16
B.1 Pendapatan.....	16
B.2 Belanja.....	17
B.2.2 Belanja Barang.....	17
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca.....	18
C.1 Persediaan.....	18
C.2 Ekuitas.....	18
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional.....	18
D.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	18
D.2 Beban Persediaan.....	18
D.3 Beban Barang dan Jasa.....	19
D.4 Beban Perjalanan Dinas.....	19
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	20
E.1 Ekuitas Awal.....	20
E.2 Surplus (Defisit) LO.....	20
E.5 Transaksi Antar Entitas.....	20
E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	20
E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar.....	21
E.6 Ekuitas Akhir.....	21
F. Pengungkapan Penting Lainnya.....	22
F.1 Kejadian Penting Setelah tanggal di Neraca.....	22
F.2 Informasi PAGU dan Realisasi Anggaran.....	23
F.3 Penyajian Rincian Output.....	24
Lampiran dan Daftar.....	25



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG**

Jalan Ahmad Yani Nomor 133 Sidikalang, Kab. Dairi
Sumatera Utara. www.pn-sidikalang.go.id, info@pn-sidikalang.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sidikalang yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.



Sidikalang, 06 Februari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang

Eva Rina Sihombing
Eva Rina Sihombing

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan No. 232/PMK.05/2024 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara nomor S-2/PB/2026 tanggal 7 Januari 2026 hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.20.020.000,- berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.20.020.000,- atau mencapai 46.89 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp.42.693.000,-

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 125.006.090,- atau mencapai 99.98 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 125.034.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2025 . Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 6.272.500,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 6.272.500; Piutang Bukan Pajak sebesar Rp.0 ; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 0 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 0,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 6.272.500,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 20.020.000,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 126.106.000,- sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp. (106.086.740,-) Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. (106.086.740,-)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp.2.217.000,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. (106.086.740,-) kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 110.142.240,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp.6.272.000,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2025
DAN 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2025			% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS/(BAWAH)		REALISASI
PENDAPATAN	B.1					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	42.693.000	20.020.000	(22.673.000)	46,89%	17.799.000
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH		42.693.000	20.020.000	(22.673.000)	0	17.799.000
BELANJA	B.2.					
Belanja Barang	B.2.1	125.034.000	125.006.090	(27.910)	99,98%	146.576.225
JUMLAH BELANJA		125.034.000	125.006.090	(27.910)	99,98%	146.576.225



Sidikalang, 06 Februari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang

Eva Rina Sihombing

PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG
NERACA
PER 31 Desember 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	%
ASET					
ASET LANCAR					
Persediaan	C.1	6.272.500	2.217.000	4.055.500	182,93
Jumlah Aset Lancar		6.272.500	2.217.000	4.055.500	182,93
JUMLAH ASET		6.272.500	2.217.000	4.055.500	182,93
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-	-	-
EKUITAS					
Ekuitas	C.2	6.272.500	2.217.000	4.055.500	182,93
JUMLAH EKUITAS		6.272.500	2.217.000	4.055.500	182,93
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		6.272.500	2.217.000	4.055.500	182,93



Sidikalang, 06 Februari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang

Eva Rina Sihombing

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2025
DAN 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN					
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	20.020.000	17.799.000	2.221.000	12,48
JUMLAH PENDAPATAN		20.020.000	17.799.000	2.221.000	12,48
BEBAN					
Beban Persediaan	D.2	40.935.150	45.370.432	(4.435.282)	(9,78)
Beban Barang dan Jasa	D.3	73.151.590	75.066.225	(1.914.635)	(2,55)
Beban Perjalanan Dinas	D.4	12.020.000	31.950.000	(19.930.000)	(62,38)
JUMLAH BEBAN		126.106.740	152.386.657	(26.279.917)	(17,25)
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(106.086.740)	(134.587.657)	(28.500.917)	21,18
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar		-	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(106.086.740)	(134.587.657)	28.500.917	(21,18)
POS LUAR BIASA		-	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(106.086.740)	(134.587.657)	28.500.917	(21,18)



Sidikalang, 06 Februari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang

Eva Rina Sihombing

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2025
DAN 31 Desember 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan
EKUITAS AWAL	E.1	2.217.000	3.085.500	(868.500)
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(106.086.740)	(134.587.657)	28.500.917
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.3	110.142.240	133.719.157	(23.576.917)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.4	4.055.500	(868.500)	4.924.000
EKUITAS AKHIR	E.5	6.272.500	2.217.000	4.055.500

Sidikalang, 06 Februari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang



Eva Rina Sihombing

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil Pengadilan Negeri Sidikalang

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Pengadilan Negeri Sidikalang sebagai instansi vertikal bertanggung jawab kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Negeri Sidikalang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah menetapkan visi, yaitu:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Sidikalang Yang Agung”

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Negeri Sidikalang menjalankan misi yang meliputi:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Meningkatkan pelayanan hukum secara prima kepada masyarakat pencari keadilan.
5. Meningkatkan profesionalisme kinerja aparat pengadilan.

Basis Akuntansi

A.2. Basis Akuntansi

Pengadilan Negeri Sidikalang Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.3. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan satuan kerja Pengadilan Negeri Sidikalang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.4. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari satuan kerja Pengadilan Negeri Sidikalang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Kantor Xxx adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a) Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - b) Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c) Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

Penyusutan Aset Tetap

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.
- c. Penyusutan Aset Tetap**
- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
 - Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
 - Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

- d. Piutang Jangka Panjang**
- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

- e. Aset Lainnya**
- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

*Penjelasan atas
Pos Laporan
Realisasi
Anggaran*

Satuan kerja Pengadilan Negeri Sidikalang memperoleh alokasi Anggaran Tahun 2025 awal sebesar Rp.125.034.000,- Selama Tahun 2025 Satuan kerja Pengadilan Negeri Sidikalang telah melakukan revisi POK sebanyak sepuluh (10) kali. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp 42.693.000	42.693.000
Jumlah Pendapatan	42.693.000	42.693.000
Belanja		
Belanja Barang	137.054.000	125.034.000

B.1 Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan
Negara Bukan
Pajak
Rp.20.020.000,-*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.20.020.000,- atau mencapai 46.89 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.42.693.000,- Pendapatan satuan kerja Pengadilan Negeri Sidikalang terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.17.799.000,-

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Tahun Anggaran 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Penerimaan Negara Bukan Pajak	42.693.000	20.020.000	46,89
Jumlah	42.693.000	20.020.000	46,89

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 12.5 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Negara Bukan Pajak	20.020.000	17.790.000	12,5
Jumlah	20.020.000	17.790.000	12,5

B.2 Belanja

Realisasi Belanja
Rp.125.006.090,-

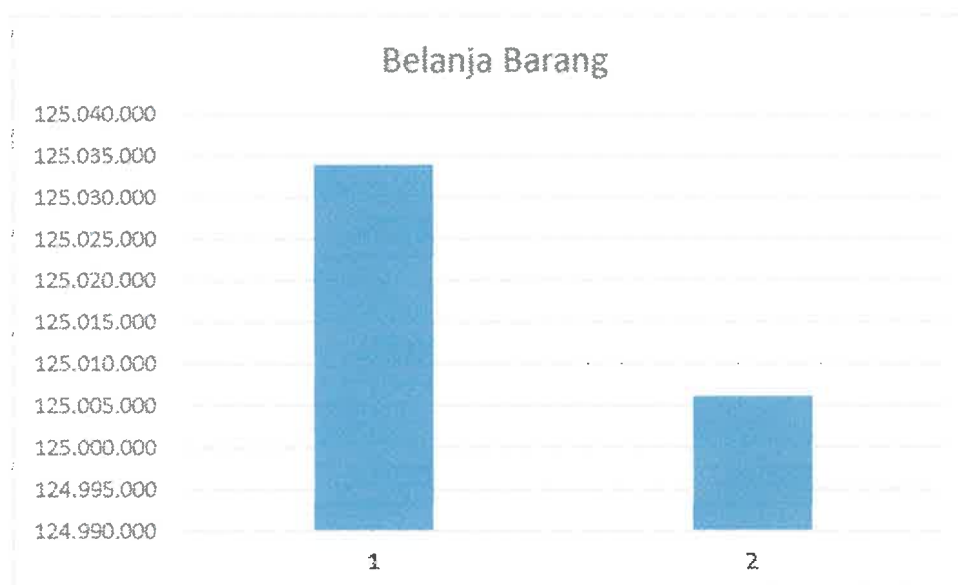
Realisasi Belanja pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp.,- atau 99 % dari anggaran belanja sebesar Rp.125.006.090,- Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Barang	125.034.000	125.006.090	99,98
Jumlah	125.034.000	125.006.090	99,98

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2025



Dibandingkan dengan tahun 2024, Realisasi belanja mengalami penurunan sebesar (14.72%). Berikut rincian realisasi belanja TA 2025 dan TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Semester II TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang	125.006.090	146.576.225	(14,72)
Jumlah	125.006.090	146.576.225	(14,72)

Realisasi
Belanja Barang
Rp.125.006.090,-

B.2.1 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.125.006.090,- dan Rp.146.576.225,-. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar (14.72%) dari Realisasi TA 2024.

Realisasi belanja barang non operasional, belanja jasa dan belanja perjalanan dinas dalam negeri, belanja pemeliharaan mengalami kenaikan

sementara realisasi belanja barang non operasional, belanja barang persediaan mengalami penurunan.

Perbandingan Belanja Barang TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos P	8.992.590	3.620.225	148,40
Belanja Bahan	28.159.000	35.446.000	(20,56)
Belanja Barang Persediaan Konsumsi	39.834.500	39.560.000	0,69
Belanja Jasa Konsultansi	36.000.000	36.000.000	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.020.000	31.950.000	(62,38)
Jumlah	125.006.090	146.576.225	(14,72)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Persediaan
Rp.6.272.500,-

C.1 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.6.272.500,- dan Rp.2.217.000,-. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2025 dan 2024

Jenis	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Barang Konsumsi	6.272.500	2.217.000
Jumlah	6.272.500	2.217.000

Ekuitas
Rp.6.272.500,-

C.2 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.6.272.500,- dan Rp.2.217.000,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Catatan Penting Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

PNBP
Rp.20.020.000,-

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.20.020.000,- dan Rp.17.799.000,-

D.2 Beban Persediaan

Beban

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.40.934.150,-

Persediaan
Rp.40.934.150,-

dan Rp. 45.370.432,-

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 9.78 persen dibandingkan dengan Tahun 2024.

Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	40.934.150	45.370.432	(9,78)
Jumlah	40.934.150	45.370.432	(9,78)

Beban Barang
dan Jasa
Rp.73.151.590,-

D.3 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.73.151.590,- dan Rp. 75.066.225,-

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 2.55 persen dibandingkan dengan Tahun 2024. Kenaikan belanja terdapat pada semua akun belanja

Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	8.992.590	3.620.225	148,40
Belanja Bahan	28.159.000	35.446.000	(20,56)
Belanja Jasa Konsultan	36.000.000	36.000.000	-
Jumlah Belanja Kotor	73.151.590	75.066.225	(2,55)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	73.151.590	75.066.225	(2,55)

Beban
Perjalanan
Dinas
Rp.12.020.000,-

D.4 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.12.020.000,- dan Rp. 31.950.000,-. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 62.38 persen. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	12.020.000	31.950.000	-62,38
Jumlah	12.020.000	31.950.000	-62,38

Catatan Penting Laporan Operasional

Tidak ada catatan penting Laporan Operasional dituangkan dalam laporan keuangan TA 2025 ini.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp.2.217.000,-

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.2.217.000,- dan Rp. 3.085.500,-

E.2 Surplus (Defisit) LO

Surplus/Defisit LO
(Rp.106.086.740)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp.106.086.740,-) dan (Rp. 134.587.657). Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas
Rp.110.142.240

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.110.142.240,- dan Rp. 133.719.157,-

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian/Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2025

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	125.006.090
Transfer Masuk	5.156.150
Diterima dari Entitas Lain	(20.020.000)
Jumlah	110.142.240

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

DDEL dan DKEL
Rp.(20.020.000,-)
dan
Rp.125.006.090,
-

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DKEL sebesar Rp.125.006.090,-sedangkan DDEL sebesar Rp (20.020.000).

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban

Rp.5.156.000,- dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2025 setelah penyusutan adalah sebesar Rp.5.156.000,-

E.6 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp.6.272.500,- Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.6.272.500,- dan Rp. 2.217.000,-

Catatan Penting Laporan Perubahan Ekuitas

Tidak ada catatan penting Laporan Perubahan Ekuitas yang perlu dituangkan dalam laporan keuangan TA 2025 ini.

F. PENGUNGKAPAN – PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini

F.2. INFORMASI KEUANGAN TERTENTU DAN INFORMASI PENTING LAINNYA**1. INFORMASI PAGU DAN REALISASI ANGGARAN S.D. 31 Desember 2025****a. Informasi dan Realisasi Belanja dan Estimasi Realisasi**

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi s.d 31 Des	Sisa Pagu s.d 31 Des	Estimasi Total Realisasi	Estimasi Pagu Tidak Terealisasi
A	B	C	D	F (C+E)	G (B-F)
52	125.034.000	125.006.090	27.910	125.034.000	-
Total	125.034.000	125.006.090	27.910	125.034.000	-

Sampai dengan 31 Desember 2025, realisasi belanja barang sebesar Rp. 125.006.090,- Dan . Serapan tersebut sudah mencapai target penyerapan 100%.

b. Informasi Pagu Minus Belanja Barang serta Rencana Mitigasi

Jenis Belanja	Uraian	Pagu	Realisasi s.d 30 September	Total Realisasi	Estimasi Sisa / Minus Pagu
A	B	C	D	F (D + E)	G (C-F)
	-	-	-	-	-

Sampai dengan 31 Desember 2025, tidak terdapat pagu minus belanja

F.3.PENYAJIAN RINCIAN OUTPUT PER FUNGSI APBN

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2025 pada satker Pengadilan Negeri Sidikalang antara lain sebagai berikut :

INFORMASI NILAI KINERJA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG TRIWULAN III TAHUN 2025

Kementerian /Lembaga : Mahkamah Agung Republik Indonesia
Eselon : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Satker : Pengadilan Negeri Sidikalang

Kode	Kegiatan	Belanja			Output			Keterangan	
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	005.03.BF-2025								
	005.03.BF.1049-2025								
001	Koordinasi	1.500.000	15.000.000	100,00	1.500.000	1.500.000	Kegiatan	100	
U03	Perkara Hukum Perseorangan	88.284.000	88.256.090	100,00	88.284.000	88.284.000	Perkara	100	
032	Hukum Perseorangan	36.000.000	36.000.000	100,00	36.000.000	36.000.000	Orang	100	
	Sub Total	125.784.000	139.256.090	100	125.784.000	125.784.000		100	
	Penyesuaian	-		-	-	-			
	Total	125.784.000	139.256.090		125.784.000	125.784.000		100	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : Ditjen Badan Peradilan Umum 03
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG 099193

Tgl Data : 18/02/26 1:56 AM
 Tgl Cetak : 18/02/26 11:20 AM
 Halaman : 2
 lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025					2024				
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%		
1	2	4	5	6	7	8	9	10		
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0		
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0		
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0		
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0		
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0		
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0		
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	125,034,000	125,006,090	(27,910)	99.98	147,810,000	146,576,225	(1,233,775)	99.17		
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0		

Keterangan :
FINAL

Sidikalang, 18 Februari 2026
 Kepala Pengadilan Negeri Sidikalang
 DANNY IRAWAN MANURUNG, S.KOM
 NIP. 198403092011011005

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (099193) PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

Tgl Data : 18/02/26 1:56 AM
Tgl Cetak : 18/02/26 11:20 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	6,272,500	2,217,000	4,055,500	182.93
JUMLAH ASET LANCAR	6,272,500	2,217,000	4,055,500	182.93
JUMLAH ASET	6,272,500	2,217,000	4,055,500	182.93

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	6,272,500	2,217,000	4,055,500	182.93
JUMLAH EKUITAS	6,272,500	2,217,000	4,055,500	182.93
JUMLAH EKUITAS	6,272,500	2,217,000	4,055,500	182.93
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	6,272,500	2,217,000	4,055,500	182.93

Keterangan :
FINAL

Sidikalang, 18 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran


DANNY IRAWAN MANURUNG, S.KOM
NIP 198403092011011005

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (099193) PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

Tgl Data : 18/02/26 1:56 AM

Tgl Cetak : 18/02/26 11:20 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	6,272,500	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	125,006,090
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	20,020,000	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	5,156,150
0.0	391111	Ekuitas	0	2,217,000
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	1,190,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	6,730,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	12,100,000
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8,992,590	0
3.0	521211	Beban Bahan	28,159,000	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	36,000,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	12,020,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	40,935,150	0
JUMLAH			152,399,240	152,399,240

Keterangan :

FINAL

Sidikalang, 18 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran


DANNY IRAWAN MANURUNG, S.KOM
NIP 198403092011011005



NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (099193) PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

Tgl Data : 18/02/26 6:37 AM
Tgl Cetak : 18/02/26 11:20 AM
Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	125,006,090
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	20,020,000	0
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	1,190,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	6,730,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	12,100,000
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8,992,590	0
3.0	521211	Belanja Bahan	28,159,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	39,834,500	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	36,000,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12,020,000	0
JUMLAH			145,026,090	145,026,090

Keterangan :
FINAL

Sidikalang, 18 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran


DANNY IRAWAN MANURUNG, S.KOM
198403092011011005



LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (099193) PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

Tgl Data : 18/02/26 1:56 AM
Tgl Cetak : 18/02/26 11:19 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	20,020,000	17,799,000	2,221,000	12.478
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	20,020,000	17,799,000	2,221,000	12.478
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	20,020,000	17,799,000	2,221,000	12.478
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	40,935,150	45,370,432	(4,435,282)	(9.776)
Beban Barang dan Jasa	73,151,590	75,066,225	(1,914,635)	(2.551)
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	12,020,000	31,950,000	(19,930,000)	(62.379)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (099193) PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

Tgl Data : 18/02/26 1:56 AM
Tgl Cetak : 18/02/26 11:19 AM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	126,106,740	152,386,657	(26,279,917)	(17.246)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(106,086,740)	(134,587,657)	28,500,917	(21.176)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(106,086,740)	(134,587,657)	28,500,917	(21.176)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(106,086,740)	(134,587,657)	28,500,917	(21.176)

Keterangan :

FINAL

Sidikalang, 18 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Korasa Pengguna Anggaran



DANNY IRAWAN MANURUNG, S.KOM

NIP 198403092011011009

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (099193) PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

Tgl Data : 18/02/26 6:37 AM
Tgl Cetak : 18/02/26 11:19 AM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	2,217,000	3,085,500	(868,500)	(28.15)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(106,086,740)	(134,587,657)	28,500,917	(21.18)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	110,142,240	133,719,157	(23,576,917)	(17.63)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	4,055,500	(868,500)	4,924,000	(566.95)
EKUITAS AKHIR	6,272,500	2,217,000	4,055,500	182.93

Keterangan :

FINAL

Sidikalang, 18 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



DANNY IRAWAN MANJURUNG, S.KOM
NIP.198403092011011005



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
KPPN SIDIKALANG

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 099193 - PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 26/01/26 9:28
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	125,034,000	125,034,000	0
2	Belanja	125,006,090	125,006,090	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	42,693,000	42,693,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	20,020,000	20,020,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 21 Januari 2026



1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

**KERTAS KERJA TELAHA LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
TAHUN 2025**

Kode dan Nama UAKPA : (099193) PENGADIAN NEGERI SIDIKALANG

Kode dan Nama UAPPAW : (098612) PENGADILAN TINGGI MEDAN

Kode dan Nama E1 : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Kode dan Nama K/L: (005) MAHKAMAH AGUNG RI

Objek Penelaahan		Kondisi LK		Seharusnya
<i>Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>				
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	✓		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	✓		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	✓		Ada
		✓		
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal	✓		Ada
2	Neraca Percobaan Akrual	✓		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	✓		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	✓		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	✓		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	✓		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	✓		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
	To Do List	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		✓	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)			Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		✓	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		✓	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		✓	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		✓	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		✓	Tidak
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>				
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		✓	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		✓	Tidak

3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√	Tidak
	a. Pagu/DIPA		√	Tidak
	b. Estimasi PNBP		√	Tidak
	c. Belanja		√	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	e. Pendapatan		√	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	g. Kas BLU		√	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	√		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak

13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		√	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada) Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah		√	Ada/Tidak
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.			Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)			Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)			Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?			Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang			Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		√	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?			Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?			Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)			Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			

	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		√	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	√		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) ,		√	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?	√		Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas				
		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud? Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST	√		
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	√		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	√		Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	√		Ya
TELAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)			Ya/Tidak

	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang			Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)			Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)			Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)			Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?		√	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?			Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)			Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
TELAAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?	√		Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?		√	Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?	√		Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?	√		Ya
5	Apakah Nilai SILPA/SIKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA	√		Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?	√		Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?	√		Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?	√		Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca	√		Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU	√		Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca	√		Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca	√		Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU	√		Ya
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN				
"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk				

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,



REDIA SIANTURI,S.E
NIP.198607292019032004



Sidikalang, 06 Februari 2026
Penelsah,



DANNY IRAWAN MANURUNG, S.Korr
NIP. 198403092011011005